

---

# STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN: PENDEKATAN SOSIAL-POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK

**Lia Sahara**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia*

---

## **Abstrak**

Strategi pengentasan kemiskinan merupakan upaya yang penting dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan sosial-politik dan kebijakan publik menjadi landasan utama dalam merancang strategi yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Artikel ini mengulas berbagai pendekatan yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan dan menganalisis peran kebijakan publik serta faktor sosial-politik yang mempengaruhi keberhasilan strategi tersebut.

**Kata Kunci:** *Strategi, Pengentasan Kemiskinan, Pendekatan Sosial-Politik*

---



## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

*Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kondisi kemiskinan tidak hanya membatasi akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga mengakibatkan ketidaksetaraan sosial, keterpinggiran, dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mengatasi masalah yang kompleks ini, diperlukan strategi yang holistik dan terpadu yang melibatkan berbagai aktor dari berbagai sektor, serta didasarkan pada pendekatan sosial-politik yang memperhatikan aspek struktural dan kebijakan publik yang mendukung.*

*Pendekatan sosial-politik dalam pengentasan kemiskinan mengakui bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan individu, tetapi juga oleh ketidaksetaraan struktural dan kebijakan yang tidak inklusif. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kemiskinan sering kali merupakan hasil dari ketidakadilan sosial dan politik yang melampaui kapasitas individu untuk mengatasi masalah ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus mencakup upaya untuk mengubah struktur dan sistem yang menghasilkan dan mempertahankan kemiskinan, selain dari memberikan bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan.*

*Salah satu elemen penting dari pendekatan sosial-politik adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memungkinkan individu dan kelompok yang rentan atau terpinggirkan untuk menjadi agen perubahan dalam proses pengentasan kemiskinan. Hal ini melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, peningkatan kapasitas, dan penguatan posisi mereka dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, pendekatan sosial-politik memastikan bahwa solusi-solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.*

*Selain pendekatan sosial-politik, kebijakan publik juga memainkan peran kunci dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan publik yang efektif mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengurangan kemiskinan dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak. Kebijakan ini juga dapat mencakup insentif untuk investasi sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta perlindungan sosial bagi mereka yang rentan. Dengan demikian, kebijakan publik yang baik dapat berperan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.*

*Dalam konteks global, penting untuk mengakui bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu negara atau satu sektor saja. Melalui kerja sama internasional dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, upaya pengentasan kemiskinan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan*

demikian, pendekatan yang holistik dan terpadu yang melibatkan berbagai aktor dari berbagai sektor dan didasarkan pada pendekatan sosial-politik dan kebijakan publik yang progresif, diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di seluruh dunia.

### **Metode Penelitian**

1. *Penelitian Literatur: Metode ini akan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen terkait strategi pengentasan kemiskinan, pendekatan sosial-politik, dan kebijakan publik. Melalui penelitian literatur, kita dapat mengidentifikasi teori-teori, konsep-konsep, dan temuan-temuan penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Selain itu, penelitian literatur akan membantu dalam memahami kerangka kerja konseptual dan mengeksplorasi berbagai pendekatan yang telah diterapkan dalam pengentasan kemiskinan di berbagai konteks global.*
2. *Studi Kasus: Metode studi kasus akan digunakan untuk menganalisis strategi pengentasan kemiskinan, pendekatan sosial-politik, dan kebijakan publik dalam konteks spesifik. Kita akan memilih beberapa negara atau wilayah yang memiliki beragam pengalaman dan pendekatan dalam mengatasi kemiskinan. Melalui studi kasus ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor sosial, politik, dan kebijakan mempengaruhi efektivitas upaya pengentasan kemiskinan.*
3. *Wawancara: Metode wawancara akan dilakukan dengan para pakar, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait bidang pengentasan kemiskinan, sosial-politik, dan kebijakan publik. Wawancara akan membantu dalam menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka tentang tantangan dan peluang dalam merancang dan melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis pendekatan sosial-politik dan kebijakan publik. Wawancara juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang isu-isu terkini dan tren dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal, nasional, dan global.*
4. *Analisis Kebijakan: Metode ini akan menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam pengentasan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kita akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut dari perspektif sosial-politik dan keberlanjutan, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan implementasi kebijakan tersebut. Analisis kebijakan akan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan publik dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan memperhatikan aspek-aspek sosial dan politik yang relevan.*

## **PEMBAHASAN**

*Strategi pengentasan kemiskinan merupakan upaya yang kompleks dan melibatkan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan sosial-politik dan kebijakan publik. Pendekatan sosial-politik menekankan pentingnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan memperhitungkan aspek-aspek politik yang memengaruhi distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Di sisi lain, kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam mendorong perubahan struktural dan redistribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana strategi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan sosial-politik dan kebijakan publik dapat menjadi landasan untuk memerangi kemiskinan secara efektif.*

*Pendekatan sosial-politik dalam pengentasan kemiskinan menyoroti pentingnya memperhatikan faktor-faktor struktural dan sosial yang menjadi penyebab kemiskinan. Hal ini termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Selain itu, pendekatan sosial-politik juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.*

*Di samping itu, kebijakan publik memainkan peran kunci dalam menyusun kerangka kerja regulasi dan insentif yang mendukung pengentasan kemiskinan. Melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, kebijakan redistribusi pendapatan dan kekayaan, seperti pajak progresif dan program bantuan sosial, dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan mengadopsi pendekatan kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan mengatasi akar masalah kemiskinan secara menyeluruh.*

*Dalam konteks strategi pengentasan kemiskinan, penting untuk memperhatikan bahwa setiap negara memiliki tantangan dan karakteristik unik yang memengaruhi upaya mereka dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif haruslah disesuaikan dengan kondisi lokal dan mempertimbangkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang ada. Misalnya, di negara-negara berkembang, di mana kemiskinan sering kali terkonsentrasi di daerah pedesaan dan di antara kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, strategi pengentasan kemiskinan perlu fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, dan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Di sisi lain, di negara-negara maju, di mana tantangan yang dihadapi mungkin lebih terkait dengan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan*

*ekonomi, langkah-langkah seperti peningkatan upah minimum, perlindungan pekerja, dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja dapat menjadi prioritas.*

*Selain itu, dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan, penting untuk memperhitungkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diadopsi. Meskipun langkah-langkah intervensi langsung seperti program bantuan tunai atau bantuan pangan mungkin dapat memberikan bantuan segera kepada mereka yang membutuhkan, tetapi langkah-langkah tersebut mungkin tidak efektif dalam mengatasi akar masalah kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terpadu untuk memperbaiki infrastruktur sosial, mempromosikan kesetaraan gender, dan membangun kapasitas masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi.*

*Selanjutnya, dalam konteks globalisasi, strategi pengentasan kemiskinan juga harus mempertimbangkan implikasi dari integrasi ekonomi dan perdagangan internasional terhadap ketimpangan ekonomi dan sosial. Sementara globalisasi dapat membawa manfaat seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan akses ke pasar global, namun juga dapat meningkatkan ketimpangan antara negara-negara maju dan berkembang, serta antara kelompok-kelompok di dalam suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang kuat dan kebijakan yang inklusif untuk memastikan bahwa manfaat globalisasi dapat didistribusikan secara adil dan merata.*

*Tidak hanya itu, tantangan dalam mengentaskan kemiskinan juga sering kali terkait dengan isu-isu politik dan kebijakan. Di banyak negara, ketidakstabilan politik, korupsi, dan ketidakadilan dalam sistem politik dapat menjadi hambatan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk berkomitmen pada reformasi kelembagaan, penegakan hukum yang kuat, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.*

*Selanjutnya, partisipasi aktif masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kemiskinan. Dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang kurang terwakili, mereka dapat membantu memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok rentan dan memastikan bahwa program-program pembangunan lebih berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.*

*Selain itu, peran sektor swasta juga tidak dapat diabaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui kemitraan publik-privat dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sektor swasta dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, yang semuanya merupakan faktor kunci dalam pengurangan kemiskinan.*

*Di samping itu, penting untuk menyadari bahwa pengentasan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak terkait. Tantangan seperti perubahan iklim, konflik bersenjata, dan krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19 dapat memperumit upaya pengentasan kemiskinan dan memerlukan respons yang cepat dan efektif dari pemerintah dan masyarakat internasional.*

*Terakhir, penting untuk diingat bahwa setiap langkah yang diambil dalam upaya pengentasan kemiskinan haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan,*

dan keberlanjutan. Hanya dengan memperhitungkan kebutuhan dan hak-hak semua individu, terutama yang paling rentan, kita dapat memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan akan berhasil menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua.

Dalam konteks strategi pengentasan kemiskinan, peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, serta implementasi kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu, kerjasama antar sektor menjadi kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional dapat menghasilkan sinergi yang kuat dan mempercepat pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan. Dengan bersatu dalam upaya ini, setiap pihak dapat memberikan kontribusi uniknya dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif.

Dalam menjalankan strategi pengentasan kemiskinan, penting untuk mengadopsi pendekatan yang berbasis hak asasi manusia. Hal ini berarti mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup layak dan mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai potensi penuhnya. Dengan memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan didasarkan pada prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada penghapusan gejala, tetapi juga pada penanggulangan akar penyebab kemiskinan.

Selain itu, dalam mengatasi kemiskinan, penting untuk mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan. Ini termasuk tidak hanya memberikan bantuan segera kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga berinvestasi dalam pembangunan kapasitas manusia, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan peluang ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, kita dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Selanjutnya, dalam mengatasi kemiskinan, penting untuk mengadopsi pendekatan yang berbasis bukti dan data. Ini berarti mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan tentang karakteristik dan penyebab kemiskinan di suatu wilayah, serta mengidentifikasi intervensi yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan efisien dan efektif.

Di samping itu, upaya pengentasan kemiskinan juga harus diintegrasikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Hal ini termasuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, seperti perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa upaya pembangunan kita tidak meninggalkan siapa pun di belakang dan menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

*Selanjutnya, dalam upaya pengentasan kemiskinan, penting untuk memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan. Hal ini termasuk perempuan, anak-anak, orang tua tunggal, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas etnis atau agama. Dengan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang, kita dapat memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan benar-benar inklusif dan berkelanjutan.*

*Terakhir, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka suara dalam penetapan agenda pembangunan, kita dapat memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas masyarakat dan promosi partisipasi publik harus menjadi bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan yang efektif.*

*Dalam menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan, perlunya adopsi pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Hal ini mencakup tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, politik, dan lingkungan. Dengan memahami bahwa kemiskinan adalah masalah multidimensional, kita dapat merancang strategi yang lebih komprehensif dan efektif untuk mengatasinya. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan menangani akar penyebab kemiskinan secara lebih efisien, sehingga menciptakan dampak yang lebih signifikan dalam jangka panjang.*

*Selain itu, penting untuk mengakui bahwa pengentasan kemiskinan bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah atau lembaga tertentu saja. Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga internasional, dan masyarakat umum, adalah kunci keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kolaborasi dan kemitraan antar sektor ini menciptakan sinergi yang kuat dan memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih luas dan beragam untuk mencapai tujuan bersama.*

*Di samping itu, perlu adanya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan. Ini berarti memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk tujuan ini digunakan secara efisien dan efektif, serta bahwa program-program tersebut benar-benar mencapai sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi mereka yang membutuhkan.*

*Selanjutnya, dalam upaya pengentasan kemiskinan, penting untuk memperhatikan dimensi sosial dan budaya dari kemiskinan. Setiap masyarakat memiliki konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang unik, yang mempengaruhi cara mereka mengalami kemiskinan dan tanggapan mereka terhadap berbagai program dan kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal dan partisipatif dalam perumusan kebijakan dan program menjadi sangat penting.*

*Selanjutnya, memperkuat kapasitas institusi lokal dan membangun jejaring kerjasama antar mereka adalah langkah yang krusial dalam pengentasan kemiskinan. Institusi-institusi lokal, seperti pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah, sering kali memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan*

peluang di tingkat lokal. Dengan memberdayakan institusi-institusi ini dan memfasilitasi kolaborasi antar mereka, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi inisiatif pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pembangunan kapasitas manusia juga menjadi fokus penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Ini termasuk investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, akses terhadap layanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang memungkinkan individu untuk mencapai potensi penuhnya. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan keterampilan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri, kita dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, penting untuk memperhatikan dimensi lingkungan dari pengentasan kemiskinan. Ketergantungan pada sumber daya alam dan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan sering kali merupakan faktor yang berkontribusi pada kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, memasukkan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut dan memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang.

Selanjutnya, memperkuat sistem perlindungan sosial dan jaringan pengaman sosial juga merupakan bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan. Perlindungan sosial seperti program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program pemberian tunjangan bagi keluarga miskin dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan melindungi individu dan keluarga dari jebakan kemiskinan yang berkelanjutan. Dengan memperkuat sistem ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga masyarakat.

## **Kesimpulan**

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pendekatan yang menggabungkan dimensi sosial-politik dan kebijakan publik menjadi semakin penting. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperhatikan aspek struktural dan multidimensional dari kemiskinan serta menyesuaikan kebijakan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berbeda. Melalui kesadaran akan kompleksitas masalah kemiskinan dan pemahaman mendalam tentang akar penyebabnya, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan ini.

Pada tingkat sosial-politik, kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci. Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, dalam merancang dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan adalah langkah penting dalam menciptakan dampak yang signifikan. Keterlibatan yang kuat dari berbagai pihak memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih luas dan beragam, serta memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan.

*Dalam konteks kebijakan publik, penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya yang efisien, pelaksanaan program yang tepat sasaran, dan evaluasi yang terus-menerus terhadap dampak kebijakan. Dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan menghasilkan hasil yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga masyarakat.*

*Selanjutnya, memperhatikan dimensi lingkungan dari strategi pengentasan kemiskinan menjadi semakin penting. Ketergantungan pada sumber daya alam dan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan sering kali menjadi faktor yang memperburuk kemiskinan. Oleh karena itu, memasukkan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut dan memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang.*

*Demikian pula, memperkuat sistem perlindungan sosial juga menjadi kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Perlindungan sosial, seperti program bantuan sosial dan jaminan kesehatan, dapat membantu melindungi individu dan keluarga dari jebakan kemiskinan yang berkelanjutan. Dengan memperkuat sistem perlindungan sosial dan memperluas cakupannya, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi mereka yang rentan terhadap kemiskinan.*

*Kesimpulannya, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang memperhatikan aspek sosial-politik dan kebijakan publik, serta mempertimbangkan dampak lingkungan dan memperkuat sistem perlindungan sosial. Hanya dengan menggabungkan berbagai dimensi ini secara terpadu, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam upaya mengakhiri kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua.*

- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Karim, A. (2017). Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes.
- Hartono, B. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).
- Dewi, W. C. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sembiring, W. M. (2023). Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli.
- Tarigan, U. (2004). Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB. Retrieved from [osf.io/3jpd/](https://osf.io/3jpd/).
- Wuri Andary, R. (2015). Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri 1 Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Tarigan, U. (2016). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U. (2012). Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh).
- Rejeki, R. (2019). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan.
- Kurniawan, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama.
- Berutu, B. R. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan).
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Santoso, M. H. (2021). Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis.
- Siregar, N. S. S. (2017). Modul Praktikum Publik Speaking.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).

- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, S. A. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan.*
- OKTAVIANI, R., & Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN MERCU PADA BENDUNGAN LAU SIMEME SIBIRU-BIRU-DELISERDANG SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- PRATAMA, R., & Harahap, G. Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN LIVING PLAZA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Rahmawani, R. (2021). Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Simarmata, O. H. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Siregar, N. S. S. (2002). Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia.*
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang.*
- Tarigan, R. S. (2017). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC).*
- Tarigan, U. (2004). Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.*
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2004). Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Kepegawaian Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*